

PPP Targetkan Penambahan Kursi Dewan Lewat Kader Perempuan

SEMARANG (KR) - Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Samsurie optimis, kursi di DPRD bakal bertambah melalui kader perempuan yang memang sudah dipersiapkan. Ada 44 Bakal Calon Legislatif perempuan yang sudah disiapkan dan didaftarkan ke KPU Jateng. Masruhan Syamsurie mengatakan hal ini kepada wartawan usai mendafkarkan Bacaleg PPP Jateng ke KPU Jateng Jumat (12/5) sore. Masruhan mengatakan, langkah untuk menambah kursi di DPRD telah dimulai saat penyusunan Bacaleg. Dari 120 Bacaleg yang telah didaftarkan di KPU Jateng, 44 diantaranya adalah perempuan. Jumlah tersebut telah melebihi batas ketentuan KPU. PPP Jawa Tengah siap menyambut Pileg 2024.

Selain Masruhan, saat pendaftaran tersebut hadir pula Sekretaris DPW PPP Jateng Suyono, bendahara dan perwakilan bacaleg di KPU Jateng. "Pada Pemilu 2024 mendatang, kursi PPP di DPRD Jateng harus bisa mencapai 13 kursi. Ini target yang harus kami perjuangkan," tutur Masruhan.

Target penambahan kursi tersebut dianggap sangat realistis, mengingat jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) di Jawa Tengah juga bertambah menjadi 13 Dapil, dan jumlah kursi juga bertambah dari 100 menjadi 120 kursi di DPRD Jateng. Selain itu, Masruhan cukup optimis dengan banyak kader perempuan yang ikut kontestasi di Pileg 2024 dan memiliki potensi kuat untuk mendulang suara dan kursi bagi PPP Jateng. Saat mendaftar di KPU Jawa Tengah, DPW PPP Jateng diiringi oleh berbagai kesenian dan arak-arakan menuju Kantor KPU Jateng. Rombongan dipimpin langsung oleh Masruhan Samsurie dengan menggunakan iring-iringan mobil Jeep warna hijau dengan atap terbuka. (Bdi)-f



KR-Budiono

Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Samsurie memimpin rombongan partai menuju kantor KPU Jateng untuk mendaftarkan Bacalegnya.

KPU-Bawaslu Harus Cermati Berkas Bacaleg

TEMANGGUNG (KR) - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengingatkan KPU harus cermat melihat berkas pendaftaran bakal calon legislator baik DPR, DPRD dan DPD. Sedangkan Bawaslu harus jeli dalam proses pengawasannya. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurliana Dian Paramita mengatakan setelah pendaftaran, saatnya verifikasi administrasi persyaratan. "Di sini KPU dan Bawaslu harus benar-benar bekerja memeriksa berkas pendaftaran dan mengawasi," kata Mita, Minggu (14/5).

Mita mengatakan KPU dan Bawaslu harus tegas pada bakal calon legislator yang memenuhi persyaratan. Dikemukakan dari hasil pemantauan JPPR masih banyak bakal calon anggota DPD yang belatar belakang sebagai pengurus partai dan beberapa diantaranya mantan narapidana korupsi serta pejabat publik. Sebagai contoh, secara nasional untuk kasus korupsi ada 8 orang, pengurus Partai Politik 34 orang, pejabat atau karyawan BUMN 4 orang dan incumbent sebanyak 35 orang.

Mita mengukui temuan hasil pantauan JPPR tersebut masih sangat terbatas mengingat tim pemantauan JPPR tidak secara menyeluruh di setiap pelosok daerah. Karena itu, tidak menutup kemungkinan masih adanya potensi beberapa calon anggota DPD lainnya yang juga mantan terpidana korupsi, pengurus partai, dan pejabat pemerintahan atau pegawai BUMN atau yang lainnya yang tidak diperbolehkan di dalam pasal 15 PKPU 11 Tahun 2023. (Osy)-f

Pelantikan DPW IAEI Jateng 2022-2027

SEMARANG (KR) - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (DPW IAEI) Jateng periode 2022-2027 dilantik di sela sela acara Seminar Nasional dan Rapat Kerja IAEI Jateng di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Kamis (11/05). Kepengurusan DPW IAEI Jateng di antaranya, Ketua Dr Naelati Tubastuvi SE MSi (Universitas Muhammadiyah Purwokerto), Sekretaris Marwini MSi, Bendahara Dr Muhammad Solahudin serta dibantu 6 bidang. Pada kesempatan tersebut dilantik pula beberapa komisariat IAEI, termasuk komisariat Unimus yang dipimpin oleh Dr Sukanto SE MSi, Sekretaris Edy Purwanto SE MM, bendahara Dr Adwinai Sinarasi SE MSi serta dibantu 5 bidang.

Sementara itu pada acara seminar yang dibuka Wakil Rektor II Unimus Dr Hardiwinoto MSi, 4 pembicara tamu yaitu Arif Hartawan (Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI), Mohammad Ismail Riyadi (Kepala Group Literasi dan Inklusi Keuangan OJK), Assoc Prof Sutan Emir Hidayat PhD (Dir Infrastruktur Ekosistem Pendukung Ekonomi Islam di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Islam RI), dan Prof Dr H Ahmad Rofik MA (dosen UIN walisongo). Seminar membahas tentang perkembangan ekonomi global, ekonomi Indonesia dan Ekonomi syariah nasional. Termasuk pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia dan berpotensi menjadi kekuatan ekonomi raksasa bagi perekonomian nasional. (Sgi)-f



KR-Sugeng Irianto

Suasana pelantikan DPW IAEI Jateng.

ANGGOTA DEWAN PUSAT VITA ERVINA SUARAKAN

Pasal Zat Adiktif Tembakau dengan Narkotika

TEMANGGUNG (KR) - Suara ketidaksetujuan pada RUU Omnibus Law Kesehatan dilonarkan anggota DPR RI Vita Ervina. Sebab, pasal di RUU Omnibus Law Kesehatan itu merugikan petani yakni terkait pasal yang samakan tembakau dengan narkotika. Anggota DPR RI Vita Ervina mengatakan dirinya bersikap menolak atas pasal tersebut dan meminta dihapus dari draf RUU yang kini dibahas komisi IX dan Kementerian Kesehatan itu.

"Tembakau tidak sama dengan narkotika dan miras, pasal ini yang mengatur perihal tembakau telah menimbulkan polemik di masyarakat," katanya Sabtu (13/5). Pasal tersebut, disampaikannya yang paling menonjol adalah pasal 154 tentang ruang lingkup zat adiktif pada hasil olahan tembakau. Dalam draft usulan RUU Kesehatan khususnya Pasal 154 Ayat 3 tertulis "Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat berupa, (a) narkotika, (b)

psikotropika, (c) minuman beralkohol, (d) hasil tembakau, dan (e) hasil pengolahan zat adiktif lainnya".

Menurutnya pasal itu secara tegas menyamakan hasil olahan tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair dengan zat adiktif yang terdapat dalam narkotika, psikotropika dan minuman beralkohol. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa menyamakan tembakau dan narkotika dalam satu definisi kelompok zat adiktif sebagai terlalu berlebihan. Diterangkan tembakau adalah tanaman yang legal. Produksinya, peredaran dan penggunaannya pun legal.

Nikotin yang terkandung dalam tembakau dia mengatakan, merupakan zat adiktif yang sah, begitu pula kafein pada kopi, teh dan minuman energi. Dikemukakan zat adiktif pada rokok tidak sebanding dengan zat adiktif yang terdapat pada narkotika seperti morfin, heroin, kokain dan ganja. Pasal kontrover-



KR-Zaini Arrosyid

Vita Ervina sampaikan penghapusan pasal yang menyamakan tembakau dengan narkotika

lainnya adalah Pasal 154 Ayat 5 yang berbunyi "Produksi, peredaran dan penggunaan zat adiktif sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 huruf (d) dan huruf (e) harus memenu-

ni standar dan atau persyaratan kesehatan".

Vita mempertanyakan mengapa hanya hasil tembakau dan hasil pengolahan zat adiktif lainnya yang harus memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Sedangkan untuk narkotika, psikotropika dan minuman beralkohol tidak disebutkan. Menurut dia, pasal ini jelas sangat diskriminatif dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi bagi petani, pekerja, buruh, konsumen atau seluruh ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT).

Jika pasal ini diloloskan, kata dia maka itu sama saja memberi predikat buruk bahwa petani tembakau sama dengan petani ganja. Dikatakan mereka bahkan juga disebut sebagai penyebab penyakit hingga kematian yang menghabiskan paling banyak dana kesehatan.

"Jadi batalkan saja pasal tembakau yang samakan Narkotika dan Miras dalam RUU Kesehatan," tegas Vita. (Osy)-f

PENDAFTARAN BACALEG DI KPU BANYUMAS

10 Parpol Sudah Melengkapi Persyaratan

BANYUMAS (KR) - Hingga Minggu (14/5) siang kemarin, sudah ada 10 partai politik (parpol) dari 18 parpol peserta Pemilu 2024 yang sudah melengkapi persyaratan pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Banyumas.

Ketua KPU Banyumas Imam Arif Setiadi menjelaskan persyaratan administrasi dan jumlah bacaleg dari 10 parpol tersebut sudah lengkap.

Sepuluh parpol tersebut adalah PKS (50 orang), NasDem (50), PDIP (50), PKN (36), Demokrat (50), Golkar (50), PBB (50), PPP (50), Gerindra (50), dan PKB (50). Pendaftaran bacaleg ditutup hari Minggu 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB. Delapan parpol yang ditunggu, Minggu siang kemarin, terdiri PAN, Partai Ummat, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Buruh, Perindo, PSI dan Partai Hanura.

"Sejumlah parpol sudah konfirmasi akan mendaftar hari ini, namun masih menyelesaikan input

aplikasi Silon," jelas Imam. Tim pemeriksa berkas di KPU Banyumas dibagi empat tim yang siap menunggu kedatangan parpol.

Sementara itu, informasi yang dihimpun KR menyebutkan, setidaknya ada empat kades di Banyumas yang mengundurkan diri untuk mencalonkan Bacaleg DPRD Banyumas.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades) Banyumas, Arif Triyanto yang dihubungi terpisah menjelaskan, hingga hari terakhir pendaftaran Bacaleg DPRD Banyumas, setidaknya sudah ada dua kepala desa dan satu anggota BPD yang mengundurkan diri.

"Sementara ini baru dua kades

dan satu anggota BPD yang surat pengunduran dirinya sampai di Kantor Dinsospermades Banyumas. Bisa saja jumlah kades dan anggota BPD yang mendaftar ba-

caleg bertambah. Namun surat tembusan pengunduran diri dari BPD belum sampai bupati yang diteruskan ke Dinsospermades jelas Arif Triyanto. (Dri)-f



KR-Dok KPU Banyumas

Tim KPU Banyumas sedang memeriksa berkas persyaratan bacaleg.

Banyak Warga Sukoharjo Jadi PMI

SUKOHARJO (KR) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menemukan cukup banyak warga Kabupaten Sukoharjo yang bekerja di luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Temuan tersebut berpengaruh pada proses pendataan pemilih Pemilu 2024. KPU Sukoharjo sendiri sudah melakukan perbaikan data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda, Jumat (12/5) mengatakan, petugas di lapangan sudah menjalankan tugas pendataan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024. Dalam proses terjun di masyarakat petugas menemukan cukup banyak warga Kabupaten Sukoharjo berasal dari beberapa kecamatan menjadi PMI. Negara tujuan PMI seperti di Jepang, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Brunei dan lainnya.

Warga Kabupaten Sukoharjo yang bekerja menjadi PMI berasal dari beberapa kelompok usia mulai dari termuda lulusan SMK atau perguruan tinggi hingga ter-

sebut terdapat seperti berasal dari warga Kecamatan Gatak, Kartasura, Weru dan Nguter.

Temuan petugas juga diperkuat dengan keterangan anggota keluarga PMI yang menyatakan ada pada saat dilakukan pendataan anggota keluarga tersebut masih berstatus bekerja di luar negeri. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti petugas dengan melakukan pencoretan dan memberi catatan pada daftar pemilih.

"Warga Sukoharjo yang masih jadi PMI maka dicoret dari daftar pemilih di tempat tinggal asal. Nantinya PMI tersebut akan tercatat oleh petugas Pemilu 2024 di luar negeri tempat asal PMI bekerja. Begitu pula sebaliknya warga Sukoharjo yang bekerja menjadi PMI dan pada saat setelah pendataan pulang ke Sukoharjo maka akan dimasukkan dalam daftar pemilih," ujarnya.

KPU Sukoharjo mencatat ada ratusan warga Kabupaten Sukoharjo yang bekerja menjadi PMI. Mereka sudah bekerja di beberapa negara dengan durasi waktu bervariasi mulai dari hitungan bulan sampai tahun. (Mam)-f

Calhaj Banjarnegara Didominasi Lansia

BANJARNEGARA (KR) -Jumlah calon jemaah haji Kabupaten Banjarnegara pada 2023 sebanyak 841 orang. Mereka terbagi dalam 3 kelompok terbang (keloter) dan akan diberangkatkan pada 15 Juni 2023. Kepala Kantor Kementerian Agama Banjarnegara, Karsono, Sabtu (13/5) mengatakan, dari 841 calon jemaah haji, sebagian besar masuk kategori lanjut usia (lansia). Bahkan, 31 calon jemaah haji diantaranya harus dibantu menggunakan kursi roda. Menurut Karsono, untuk memberi pelayanan kepada para lansia, tidak mungkin mengandalkan para petugas saja. Solusinya, akan dicarikan tenaga relawan. "Jadi, kami akan sediakan relawan untuk membatu Jemaah lansia yang membutuhkan bantuan dalam melaksanakan ibadah haji, terutama yang menggunakan kursi roda," kata Karsono pula.

Jemaah calon haji Kabupaten Banjarnegara 2023 tergabung dalam keloter 78 (bersama dengan rombongan dari Kabupaten Banyumas), keloter 79 (semuanya dari Jemaah Banjarnegara), dan keloter 80 (bersama dengan rombongan haji Kabupaten Pati). Dalam pada itu, Penjabat Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahanto, dalam rapat koordinasi pemberangkatan calon jemaah haji 2023 Jumat (12/5) meminta perhatian khusus kepada para petugas mengingat sebagian besar calon jemaah haji tergolong lansia. "Mereka sangat membutuhkan bantuan saat menjalankan ibadah nanti. Para petugas harus lebih sabar," kata Tri Harso. Ia juga meminta jika ada permasalahan segera dikomunikasikan dengan petugas lain sebelum pemberangkatan. (Mad)-f

228 Pejabat Fungsional Kabupaten Klaten Dilantik

KLATEN (KR) - Bupati Klaten Hj Sri Mulyani, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 75 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan. Selain itu, juga melantik serta mengambil sumpah 228 pejabat fungsional.

Sekda Klaten Jajang Prihono Minggu (14/5) mengemukakan, penyerahan SK PPPK Bidang Kesehatan dan pelantikan 228 pejabat fungsional yang dilakukan pekan kemarin terbilang cukup lama, karena petugas dari Sub Bagian Protokol dan Komuni-

kasi Pimpinan (Prokopim) Setda Klaten serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Klaten harus membacakan 29 SK Bupati Klaten. "Penyerahan SK PPPK Bidang Kesehatan dan pelantikan serta pengambilan sumpah janji pejabat fungsional ini terbilang cukup lama. Kami yang mendengarkan saja kelihatan capek, apalagi yang membaca dari Bagian Prokopim dan BKPSDM," kata Jajang Prihono.

Pejabat Fungsional diharapkan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka menghadapi perubahan paradigma yang terus berkem-

bang pesat. "ASN P3K Tenaga Kesehatan, ini jangan sampai disiasikan, tapi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hendaknya dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja," tambahnya.

Menurut Jajang, dengan menerima Surat Keputusan Bupati Klaten sebagai ASN P3K Tenaga Kesehatan, maka mereka bukan lagi sebagai orang yang bebas berbuat dan berperilaku, tetapi ada aturan dan norma yang mengikat sebagai ASN. Karena itu agar para ASN P3K Tenaga Kesehatan untuk bisa menjaga sikap dan perilaku, jaga nama baik Korps dan integritas sebagai abdi

negara. "Pelajarilah aturan-aturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban serta larangan-larangan bagi ASN PPPK. Kepada seluruh pejabat fungsional dan pegawai P3K Tenaga Kesehatan

yang telah dilantik dan diambil sumpah dan janjinya untuk bekerja di tempat kerja masing-masing secara profesional sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku," jelas Jajang. (Sit)-f



KR-Sri Warsti

Sekda Klaten Jajang Prihono menyerahkan SK.